

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BPR SATYA MITRA ANDALAN TAHUN 2016

Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR merupakan bank yang dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyelurkannya kembali dalam bentuk kredit.

BPR sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola - *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan *Good Corporate Governance*.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*akuntability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

Manajemen PT. BPR Cosmic Mitra Andalan sebagaimana telah berganti nama menjadi PT BPR Satya Mitra Andalan menilai bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) sudah saatnya untuk di laksanakan di lingkungan Bank ini mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Daerah khususnya di Wilayah Kota Batam.

Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam

pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan *corporate value* dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat, baik secara Lokal maupun nasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan Perseroan dapat tercapai.

Fungsi Pedoman Kebijakan & Prosedur GCG

Sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi PT BPR Satya Mitra Andalan, sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR.

Tujuan Pelaksanaan GCG di PT BPR Satya Mitra Andalan adalah Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.

- a. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- c. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- d. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- e. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

Dasar Hukum Kebijakan GCG

Penyusunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT BPR Satya Mitra Andalan adalah :

1. Undang-Undang

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007.
- UU RI NO. 10 TAHUN 1998 Tentang Perubahan UU NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

2. Peraturan Pemerintah

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat .
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13./ POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Buku Pedoman GCG Indonesia Tahun 2006 – Komite Nasional Kebijakan Governance.

3. Anggaran Dasar PT BPR Satya Mitra Andalan dan Perubahannya.

Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 11 (sebelas) aspek berikut :

a. Pelaksaaan Tugas dan Tanggungjawab dewan Komisaris dan Direksi.

a.1 Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi belum lengkap sesuai ketentuan :

- Komisaris berjumlah 1 (satu) orang sama dengan jumlah Direksi.
- Penambahan Calon Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan dalam tahap pengajuan nama calon.
- Komisaris dan Direksi yang ada saat ini telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
- Antara Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a.2 Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris.

- Dewan Komisaris telah melaksanakan **tugasnya** sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Bank Indonesia dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank

2) Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.

- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

a.3 Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Rekomendasi Kenaikan Gaji Karyawan 2016
- Rekomendasi revisi RKAT PT. BPR Satya Mitra Andalan tahun 2016
- Rekomendasi RKAT tahun 2016

b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

BPR Satya Mitra Andalan sedang menyusun komposisi Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko beserta Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite2 Penunjang Dewan Komisaris.

c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

c.1. fungsi kepatuhan

- Direktur dan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direktur dan Audit Internal untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.2. fungsi audit intern

Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai SPFAIB.

- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), untuk selanjutnya akan menuju kepada audit tiga bulanan, Audit semesteran, audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dengan Tembusan ke Dewan Komisaris. Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

c.3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan manajemen
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

d. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

Penerapan GCG untuk Manajemen Risiko ini belum berjalan sepenuhnya, karena masih dalam penyusunan dan perumusan SPO. Untuk saat ini pengendalian internal dilakukan berdasarkan Job Description masing masing bagian dan double cross check dari atasan langsung. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern diharapkan akan seutuhnya terlaksana di tahun berikutnya.

e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BPK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
3. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
4. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2016 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (OS)
1	Kepada Pihak Terkait	1	Rp. 493.379.996,-

f. Rencana Strategis Bank

f.1. Rencana jangka pendek tahun 2017

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2017.

- Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- Regulasi dari stakeholder (BP Batam dan Badan Pertanahan kota Batam), yang berdampak pada poses kredit Perbankan.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Satya Mitra Andalan untuk jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Mengupayakan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM berupa modal kerja dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Rasio LDR per 31 Desember 2016 sebesar 89,33%. Upaya peningkatan ekspansi harus dilakukan dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT. BPR Satya Mitra Andalan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kredit yang berkurang dari tahun sebelumnya yang dilihat dari jumlah Outstanding .

No	OS Kredit	2016	2015	%
1		58.926.696.290,98,-	69.892.254.706,86,-	-15.68

- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif. Namun terdapat penurunan pencapaian dari tahun sebelumnya disebabkan penurunan

pertumbuhan kredit dan suku bunga kurang kompetitif. Hal ini terlihat dari table di bawah ini.

No	Dana Pihak Ketiga	2016	2015	%
1	Tabungan	1.841.180.635,-	2.656.518.529,-	-30,69
2	Deposito	52.979.874.747,-	59.642.615.247,-	-11,17

- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

f.2. Rencana jangka menengah

1) Finansial

- Berupaya mencapai pertumbuhan kredit yang diimbangi pertumbuhan dana pihak ketiga untuk menjaga tingkat rasio yang sehat

LDR	2016	2015	pertumbuhan%
	88,51 %	92,21%	-4,01 %

- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif yaitu dibawah 85 % dengan pelaksanaan efisiensi biaya operasional.

2) Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.

- Mencapai pangsa pasarkredit modal kerja dan konsumen di atas 1.18 %
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Satya Mitra Andalan.

3) Karyawan

- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR Satya Mitra Andalan melalui *Competency Based Human Resouces Management*.

g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan diharapkan akan segera diberlakukan.
2. Bank sedang melakukan kajian berupa instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan selanjutnya secara bertahap kedepannya akan disajikan pada *Home Page* PT. BPR Satya Mitra Andalan, sesuai dengan ketentuan .
5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6. PT. BPR Satya Mitra Andalan akan menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPR Satya Mitra Andalan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Satya Mitra Andalan.

tidak memiliki saham pada PT. BPR lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan BPR Satya	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn Lain	PS BPR/ Prshn Lain	Bidang Usaha
Tri Siska Yuliana	Komisaris	Tidak ada	Accounting & Finance	Tidak ada	Kontraktor Umum
Erwin	Dirut	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris PT. BPR Satya Mitra Andalan secara tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Direksi PT. BPR Satya Mitra Andalan tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Komisaris dan Direksi PT. BPR Satya Mitra Andalan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Tri Siska Yuliana	Komisaris		√		√		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Erwin	Direktur		√		√		√		√		√		√

4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya,

antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2016 sebesar Rp 490.869.333,- , sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2016 sebesar Rp. 13.454.003,- terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Gaji	1	Rp 108.333.333,-	1	Rp 382.536.000,-
Tunjangan Telpon, Asuransi	1	Rp -	1	Rp 13.454.003,-
Total		108.333.333,-		Rp. 395.990.003,-

5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

6. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 5,16 x
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 2,29 x
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,004 x

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dalam setahun yang terbagi dalam empat (I,II,III,IV) kuartal.

8. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR Satya Mitra Andalan selama tahun 2016 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Satya Mitra Andalan selama tahun 2016 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Tidak ada Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR Satya Mitra Andalan selama tahun 2016 dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Satya Mitra Andalan.

Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Satya Mitra Andalan. periode Desember 2016, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 2.83 dengan predikat Cukup Baik
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	2	0.58
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	2	0.43
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%		0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	5	0.56
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	4	0.52
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	3	0.36
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	2	0.06
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10%		0.00
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.50%	2	0.23
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7,50%	2	0.18
11	Rencana Strategis Bank	7,50%	2	0.23

	Nilai Komposit	100.00%		3.15
	Predikat Komposit			Cukup baik

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR Satya Mitra Andalan, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Satya Mitra Andalan tahun buku 31 Desember 2016.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.

PT. BPR Satya Mitra Andalan

Tri Siska Yuliana

Komisaris

Erwin

Direktur